

## PERAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INTANSI (SAKTI) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

<sup>1</sup>Jimi, <sup>2</sup>Ujang Suherman

Email: <sup>1</sup>[mn22.jimi@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:mn22.jimi@mhs.ubpkarawang.ac.id), <sup>2</sup>[ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id](mailto:ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id)

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Buana Perjuangan Karawang

### ABSTRAK

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan di Tingkat Kelembagaan) yang dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja pemerintah pusat, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SAKTI dalam pengelolaan anggaran, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan berdasarkan temuan kerja praktek. Metode yang digunakan adalah observasional deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI memfasilitasi proses input, verifikasi, dan pelaporan anggaran secara digital dan terintegrasi. Namun, implementasinya masih menemui beberapa tantangan, seperti kurangnya pelatihan teknis, dukungan belanja modal yang tidak memadai, dan koordinasi antar operator yang kurang optimal. Diskusi tersebut mengaitkan temuan tersebut dengan teori manajemen keuangan publik dan sistem informasi keuangan terintegrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SAKTI sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan kebijakan internal. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas teknis dan perencanaan strategis untuk memastikan sistem beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** SAKTI, pengelolaan anggaran, sistem informasi keuangan, manajemen keuangan publik, Kementerian Agama

### ABSTRACT

*The application of information technology in the management of state finances is a crucial step in supporting transparent and accountable governance. One form of this transformation is the implementation of the SAKTI application (Financial Application System at the Institutional Level), which is utilized by all central government work units, including the Ministry of Religion of Karawang Regency. This research aims to analyze the effectiveness of the SAKTI application in budget management, identify the challenges faced during its implementation, and provide improvement suggestions based on practical work findings. The method employed is descriptive observational, with data collection*

### Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*through direct observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that the SAKTI application facilitates the processes of input, verification, and budget reporting in a digital and integrated manner. However, its implementation still encounters several challenges, such as a lack of technical training, insufficient capital expenditure support, and suboptimal coordination among operators. The discussion links the findings to theories of public financial management and integrated financial information systems. The conclusion of this study emphasizes that the success of the SAKTI application implementation is significantly influenced by the readiness of human resources and internal policies. Consequently, there is a need to strengthen technical capacity and strategic planning to ensure the system operates effectively and sustainably.*

**Keywords:** SAKTI, budget management, financial information system, public financial management, Ministry of Religious Affairs

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah signifikan menuju terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu metode utama untuk melaksanakan transformasi ini adalah melalui penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Lembaga (SAKTI), yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Seperti yang disebutkan oleh Simamora Aprilia dan Wahyudi (2023), SAKTI adalah aplikasi web komprehensif yang menggantikan sistem sebelumnya seperti SAIBA, SIMAK-BMN, dan SAS, memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dalam satu sistem terintegrasi yang didukung oleh basis data yang kohesif. Selain itu, Nasution dkk. (2024) menekankan bahwa SAKTI tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan tetapi juga meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dengan terintegrasi dengan Sistem Kas Negara dan Anggaran (SPAN).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi SAKTI di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Berdasarkan temuan dari pekerjaan lapangan yang dilakukan di instansi ini, beberapa masalah teridentifikasi, termasuk kurangnya keahlian teknis di kalangan pegawai dalam penggunaan modul SAKTI, keterbatasan akses antar modul, dan infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Selain itu, pembagian tanggung jawab di antara operator dan pengguna aplikasi masih tidak konsisten, yang menghambat implementasi aplikasi secara sukses. Tantangan-tantangan ini menyoroti kebutuhan akan penilaian efektivitas SAKTI dalam memfasilitasi pengelolaan anggaran yang efisien dan terintegrasi.

Dari sudut pandang teoretis, pembahasan mengenai pengelolaan keuangan negara dapat dijelaskan melalui kerangka kerja pengelolaan keuangan publik. Bayu Surindra (2020) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik mencakup perencanaan, mobilisasi, dan pengawasan dana yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, Prof. Indra Bastian (2020) menyoroti bahwa pengelolaan keuangan negara yang efektif harus memprioritaskan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pada tingkat menengah, Musnawati dkk. (2019) menjelaskan bahwa siklus pengelolaan anggaran di lembaga pemerintah terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus dilakukan secara sistematis. Mereka juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, termasuk kualitas perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, administrasi anggaran, dan proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks ini, tujuan magang/kerja praktik ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi SAKTI dalam mengelola anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Karawang, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama implementasi aplikasi tersebut, serta mengusulkan solusi alternatif yang dapat meningkatkan pelaksanaan sistem keuangan digital di organisasi pemerintah.

## METODE

Kegiatan magang ini dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi deskriptif, yang dirancang untuk menggambarkan dan mengevaluasi praktik-praktik di lapangan, khususnya terkait implementasi aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran. Metode ini cocok digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman komprehensif tentang kondisi aktual tanpa intervensi langsung (Nasution et al., 2024). Magang ini berlangsung di Subbag Tata Usaha Perencanaan Kementerian Agama di Kabupaten Karawang selama tiga bulan, dari Februari hingga April 2025. Subdivisi ini berperan penting dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pengendalian anggaran, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk mengevaluasi efektivitas sistem keuangan digital.

Dalam pelaksanaan kegiatan, data dikumpulkan menggunakan berbagai metode, termasuk pengamatan langsung terhadap praktik pengelolaan anggaran dan penggunaan aplikasi SAKTI oleh karyawan, wawancara informal dengan operator dan pejabat yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut, serta tinjauan dokumen pendukung seperti laporan pertanggungjawaban (LPJ), dokumen perencanaan anggaran (DIPA), dan catatan buku harian. Metode triangulasi ini sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas temuan lapangan (Simamora Aprilia & Wahyudi, 2023).

Fokus utama inisiatif ini adalah staf dan operator di Subdivisi Perencanaan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan keuangan melalui SAKTI. Para magang secara aktif terlibat dalam berbagai tugas teknis, termasuk penginputan data ke sistem, verifikasi dan validasi dokumen anggaran, serta dokumentasi pengadaan melalui aplikasi SIRUP dan katalog elektronik LPSE. Selama proses ini, para magang juga memberikan dukungan untuk tugas administratif tambahan terkait pengelolaan anggaran, seperti pengolahan data tunjangan kinerja (Tukin) dan penyusunan laporan BOPRA.

Prosedur kegiatan disusun bertahap, dimulai dengan pengenalan lingkungan kerja dan sistem institusional, diikuti dengan partisipasi langsung dalam operasi teknis modul SAKTI, khususnya modul anggaran. Kegiatan diakhiri dengan pendokumentasian dan evaluasi hasil magang, yang menjadi dasar pengembangan laporan ini dan artikel ilmiah. Seluruh proses juga mencerminkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, yang sangat relevan dalam pendidikan manajemen berorientasi praktik.

## HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK DAN PEMBAHASAN

### Hasil Utama:

Selama magang di Subdivisi Administrasi Perencanaan Kementerian Agama di Kabupaten Karawang, para praktikan secara aktif berpartisipasi dalam proses pengelolaan anggaran digital menggunakan aplikasi SAKTI. Partisipasi mereka mencakup berbagai aspek administratif dan teknis terkait input data, verifikasi, dan pelaporan keuangan untuk lembaga tersebut.

Hasil utama dari kegiatan ini adalah keterlibatan para praktikan dalam input dan verifikasi data keuangan dalam sistem SAKTI, khususnya pada modul anggaran. Proses ini melibatkan penginputan data untuk tunjangan kinerja (Tukin), dokumen kenaikan gaji periodik (KGB), dan catatan kehadiran karyawan, serta verifikasi dokumen pendukung anggaran. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan integrasi secara real-time antar modul. Namun, pengalaman praktis menunjukkan bahwa akses antar modul masih terbatas, sehingga hanya operator tertentu yang dapat mengakses modul tertentu. Akibatnya, hal ini menyebabkan

ketergantungan yang signifikan pada koordinasi antar pengguna, seperti yang dijelaskan dalam laporan magang sebagai berikut.



Gambar 1. Tampilan 9 Modul SAKTI  
Sumber: Laporan KP Jimi, 2025

Hasil kedua melibatkan partisipasi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Biaya Peralatan Operasional (BOPRA). Magang berkontribusi dalam pengumpulan dan digitalisasi dokumen, serta proses mail merge untuk pelaporan rutin. Sistem SAKTI dianggap cukup bermanfaat dalam mengonsolidasikan data pelaporan; namun, tantangan tetap muncul ketika data antar modul tidak sinkron akibat kesalahan input awal.

Hasil ketiga berkaitan dengan identifikasi tantangan teknis yang dihadapi selama penggunaan SAKTI. Berdasarkan wawancara dengan staf di Unit Administrasi, beberapa tantangan berulang meliputi akses sistem yang tidak konsisten, komplikasi dalam proses revisi anggaran, dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola sistem yang terbatas. Misalnya, data mengenai realisasi belanja modal dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja modal sangat minim, dengan tidak ada alokasi sama sekali pada tahun 2024 untuk kebutuhan peralatan pendukung SAKTI. Visualisasi realisasi ini disajikan dalam Grafik Anggaran Tersisa dan Grafik Realisasi Belanja Modal yang termasuk dalam laporan magang seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



Gambar 2. Grafik Sisa Anggaran Tahun 2022 - 2024  
Sumber: Laporan KP Jimi, 2025



Gambar 2. Grafik Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 - 2024

Sumber: Laporan KP Jimi, 2025

Gambar ini menjadi bukti bahwa perlunya perhatian khusus dalam alokasi belanja dalam mendukung berbagai aktifitas yang diperlukan dalam hal ini khususnya untuk SAKTI.

Masalah yang teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan meliputi kekurangan pelatihan teknis yang memadai bagi operator, yang menghambat adaptasi mereka terhadap sistem digital; alokasi belanja modal yang tidak memadai, yang menghambat penyediaan perangkat keras yang diperlukan; dan koordinasi yang tidak efektif di antara operator akibat ketidakhadiran prosedur operasional standar (SOP) untuk pelaksanaan tugas di setiap modul. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang cepat telah menyebabkan revisi anggaran yang sering, yang mengakibatkan penurunan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran).

Dari sudut pandang teoretis, penerapan aplikasi SAKTI di Kementerian Agama Kabupaten Karawang secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Simamora dan Wahyudi (2023) menegaskan bahwa sistem SAKTI dirancang untuk mendukung proses pengelolaan keuangan berbasis akrual dan basis data tunggal yang terintegrasi, sehingga mengurangi duplikasi data dan mempercepat pelaporan. Pada dasarnya, aplikasi ini mencerminkan teori sistem informasi keuangan terintegrasi yang diuraikan oleh (Nasution dkk. (2024), yang menyatakan bahwa sistem ERP berbasis web memungkinkan semua proses keuangan dikelola dalam satu platform dengan validasi otomatis dan pelacakan yang akurat.

Meskipun demikian, situasi aktual menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang tersedia. Sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Musnawati dkk. (2019) efektivitas siklus anggaran tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan perencanaan, kompetensi operator, dan kejelasan peraturan teknis. Oleh karena itu, wawasan yang diperoleh dari kegiatan magang ini menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan memperkuat infrastruktur digital sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi pelaksanaan SAKTI secara sukses di lembaga pemerintah.

## Permasalahan:

Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan praktik lapangan menunjukkan bahwa aplikasi SAKTI belum sepenuhnya dioptimalkan untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran yang efektif di Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelatihan teknis yang diberikan kepada operator SAKTI. Beberapa staf yang

diwawancarai menyatakan bahwa pelatihan yang diterima sejauh ini bersifat umum dan kurang mendalam, terutama terkait pemahaman spesifik tentang modul-modul SAKTI yang berkaitan dengan anggaran, komitmen, dan pelaporan. Akibatnya, kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan dalam proses verifikasi, dan ketidakakuratan dalam pengelompokan data keuangan terus terjadi secara berkala. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jannah (2023), yang menyoroti bahwa tantangan utama dalam implementasi SAKTI di lembaga pemerintah adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal.

Masalah kedua berkaitan dengan keterbatasan belanja modal, yang secara langsung mempengaruhi ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, termasuk peralatan komputer yang memadai, koneksi internet yang stabil, dan perangkat lunak tambahan. Selama dua tahun terakhir, alokasi belanja modal di Kementerian Agama Karawang sangat rendah, dan pada tahun 2024, tidak ada implementasi sama sekali. Ketiadaan dukungan anggaran telah menyebabkan keterlambatan operasional dan ketergantungan pada peralatan usang yang tidak mampu mendukung sistem baru secara memadai. Namun, seperti yang dicatat oleh Ramadhan dkk. (2024), efektivitas sistem informasi keuangan digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, yang berfungsi sebagai landasan utama untuk implementasinya.

Masalah utama ketiga adalah kurangnya koordinasi antar operator aplikasi SAKTI, khususnya dalam pengelolaan operasional antarmodul. Setiap modul diawasi oleh satu operator yang memiliki akses terbatas ke modul yang ditugaskan. Akibatnya, jika terjadi kesalahan input atau keterlambatan pada satu modul, hal tersebut akan berdampak buruk pada proses di modul lainnya. Skenario ini menyebabkan alur pengelolaan anggaran tidak sinkron, yang sering kali menghambat proses pencairan atau pelaporan anggaran secara keseluruhan. Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait koordinasi teknis antar operator. Sebagaimana dikemukakan Musnawati dkk. (2019) inefisiensi dalam administrasi dan koordinasi internal merupakan salah satu faktor yang menghambat realisasi anggaran yang optimal di instansi pemerintah.

Selain ketiga masalah utama tersebut, masalah signifikan lainnya adalah frekuensi revisi anggaran yang berlebihan. Menurut wawancara dengan staf perencanaan, revisi mendadak sering kali dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pusat atau efisiensi anggaran yang tidak terduga. Revisi tersebut menyulitkan penyusunan kembali kegiatan dan berdampak langsung pada penurunan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Laporan kerja praktik menunjukkan bahwa sisa anggaran Kementerian Agama Karawang tahun 2024 sebesar Rp1,72 miliar, meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih belum tepat dan kurang tanggap terhadap dinamika kebijakan, sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan anggaran.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam melaksanakan SAKTI bukanlah terletak pada sistemnya, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur yang kurang memadai, serta koordinasi dan perencanaan internal yang kurang memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan solusi yang mencakup pelatihan, kebijakan anggaran, dan peningkatan manajemen operasional dalam kerangka internal lembaga.

## **Pembahasan:**

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di Sub-Divisi Administrasi Perencanaan Kementerian Agama Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SAKTI berperan penting dalam memfasilitasi tata kelola keuangan berbasis digital. Keterlibatan praktisi dalam input dan verifikasi data dalam modul anggaran, serta dalam penyusunan LPJ dan BOPRA, memberikan indikasi yang jelas bahwa aplikasi ini telah mengubah proses manual menjadi proses yang sistematis dan digital. Pemanfaatan SAKTI merampingkan proses pelaporan keuangan, karena semua aktivitas keuangan dikonsolidasikan dalam satu platform. Hal ini

sejalan dengan pernyataan Simamora Aprilia dan Wahyudi (2023), yang menyatakan bahwa sistem SAKTI dirancang sebagai sistem terintegrasi berbasis web yang menampilkan satu basis data, yang meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan pemerintah.

Meskipun demikian, penerapan SAKTI dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penggunaannya secara efektif. Masalah seperti pelatihan teknis yang tidak memadai, belanja modal yang terbatas, dan koordinasi yang buruk di antara operator merupakan masalah yang terus berlanjut. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran proses, tetapi juga berdampak buruk terhadap pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang menjadi tolak ukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah.

Dalam kerangka teoritis, situasi ini mendukung perspektif Nasution dkk. (2024) yang berpendapat bahwa keberhasilan penerapan sistem keuangan digital tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri tetapi juga pada kesiapsiagaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Dari sudut pandang pengelolaan keuangan publik, Prof. Indra Bastian (2020) menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar tata kelola APBN meliputi efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sementara implementasi SAKTI secara konseptual mendukung prinsip-prinsip ini, pengalaman praktis di lapangan mengungkapkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan teknis tetap ada.

Selain itu, masalah seperti kesalahan dalam entri data, penyesuaian anggaran yang tidak terduga, dan kurangnya pemanfaatan fitur aplikasi menunjukkan bahwa sistem yang efektif masih memerlukan dukungan regulasi internal dan kemampuan organisasi yang kuat. Musnawati dkk. (2019) lebih lanjut menyoroti bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang cermat, proses administrasi yang ketat, dan kecakapan teknis personel dalam mengawasi sistem informasi keuangan.

Akibatnya, hasil dari upaya kerja praktek ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu sistem tetapi juga menunjukkan seluk-beluk yang terlibat dalam penggabungan teknologi, kebijakan, dan perilaku organisasi dalam kerangka manajerial yang terpadu. Penerapan aplikasi SAKTI tidak dapat beroperasi secara terpisah; itu membutuhkan pelatihan berkelanjutan, peningkatan struktur kerja, dan manajemen perubahan strategis dalam birokrasi pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan yang berlangsung selama pelaksanaan kerja praktek, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SAKTI berdampak positif terhadap proses pengelolaan anggaran yang digital dan lebih akuntabel di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Sistem ini secara efektif mengintegrasikan berbagai proses keuangan ke dalam satu platform yang saling berhubungan, memfasilitasi masukan, verifikasi, dan pelaporan anggaran. Namun demikian, keberhasilan penerapan aplikasi ini dalam praktiknya menghadapi tantangan, terutama yang timbul dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antar operator yang tidak memadai, serta infrastruktur dan dukungan anggaran yang tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital dalam tata kelola keuangan tidak semata-mata bergantung pada teknologi tetapi dipengaruhi secara signifikan oleh kesiapan organisasi dan manajemen internal.

Untuk meningkatkan dan memperkuat implementasi aplikasi SAKTI di masa mendatang, disarankan bagi lembaga untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi untuk memfasilitasi koordinasi antar operator modul dalam sistem. Selain itu, pelatihan teknis rutin sangat penting, dengan fokus pada peningkatan pemahaman operator tentang fungsi dan integrasi modul dalam aplikasi SAKTI. Selain itu, instansi juga harus mempertimbangkan alokasi anggaran yang tepat untuk belanja modal, khususnya untuk pengadaan perangkat keras dan infrastruktur teknologi yang mendukung pengoperasian sistem digital. Ketiga langkah tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan

aplikasi SAKTI dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, N. (2023). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN*.  
[https://repository.unsri.ac.id/127635/2/RAMA\\_62201\\_01031281924074\\_0017037302\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/127635/2/RAMA_62201_01031281924074_0017037302_01_front_ref.pdf)
- Musnawati, Basri, Y. M., & Nasrizal. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TAHUN 2017. *Akuntansi*, 2, 1-13.  
<https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/7859/6392>
- Nasution, I., Purba, R., & Maisyarah, R. (2024). EFEKTIFITAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 2, 454-468.
- Prof. Indra Bastian, Ph. d, M. C. C. Mediator. (2020). *Manajemen Keuangan Publik* (J. Deviyanti, L. Mayasari, E. Andwiatwoni, Andang s, & Stevani, Eds.; 2020th ed., Vol. 1). Andi dengan BPFE.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8T5DEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen+keuangan+publik+&ots=Pptb6MygJ7&sig=SrSB4M2ksLiM6X9DEQa1N4wUSUg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20keuangan%20publik&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8T5DEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen+keuangan+publik+&ots=Pptb6MygJ7&sig=SrSB4M2ksLiM6X9DEQa1N4wUSUg&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20keuangan%20publik&f=false)
- Ramadhan, F. (2024). *IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DI BPKP JAKARTA*.
- Simamora Aprilia, F., & Wahyudi, I. (2023). *IMPLEMENTASI “SAKTI” DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA TENTANG PENILAIAN KINERJA BERBASIS LAPORAN KEUANGAN - STUDI KASUS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI*. 114-132.  
[https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/598/332/1509?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=VrjNOOXXGm3elOqHYxaWFCxc0.pzvtQ.kvIQUKd8N\\_E-1739327064-1.0.1.1-70.oLsNPeqOwj4Cz4ScHJbAaQVRZpkCNDuoNDD607IM](https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/download/598/332/1509?__cf_chl_tk=VrjNOOXXGm3elOqHYxaWFCxc0.pzvtQ.kvIQUKd8N_E-1739327064-1.0.1.1-70.oLsNPeqOwj4Cz4ScHJbAaQVRZpkCNDuoNDD607IM)
- Surindra, B., Lestari, S. N., & Ridwan. (2020). *Buku Manajemen Keuangan Umum* (W. Nugroho & E. Edo M, Eds.; Cetakan Pertama 2020).  
<https://repository.unpkediri.ac.id/4170/2/Uji%20Plagiasi%20Manajemen%20Keuangan.pdf>